

**KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH (CAMAT) DALAM MENUNJANG
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN WALENRANG
UTARA KABUPATEN LUWU**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi negara*

OLEH

SUDIRMAN

45 10 021 021

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK

UNIVERSITAS "45" MAKASSAR

2015

HALAMAN PENGESAHAN



Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar tersebut di bawah ini :

Nama : SUDIRMAN
Nomr Pokok : 45 10 021 021
Jurusan : Administrasi Negara
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul : **Koordinasi Pemerintah daerah (Camat) Dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan Wilayah Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu**

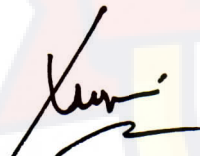
Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Usjian Skripsi pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar.


Makassar ,.....2015

Menyetujui :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Hj. Nurmi Nonci, M.Si.


Drs. Uddin B. Sore, SH., M.Si

Mengetahui :

Dekan Fisipol

Ketua Jurusan

Administrasi Negara


Dra. Hj. Juharni M.Si


Drs. Uddin B. Sore, SH., M.Si



HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari, *Selasa tanggal tiga bulan tiga tahun dua ribu lima belas* dengan judul "KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH (CAMAT) DALAM MENUNJANG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DIWILAYAH KECAMATAN WALENRANG UTARA KABUPATEN LUWU"

Nama : **SUDIRMAN**
Nomor Stambuk : **45 10 021 021**
Jurusan : **Administrasi Negara**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

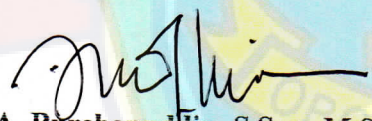
Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa "45" Makassar untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana (S - 1) Pada jurusan Administrasi Negara program Studi Ilmu Adminstrasi Negara.

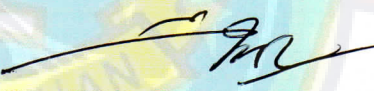


Pengawas Umum

Dra. Hj. Juharni, M.Si
Dekan FISIP Universitas Bosowa "45"

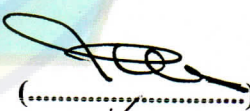
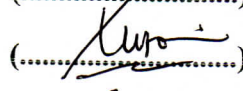
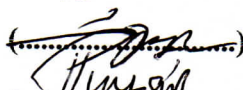

Panitia Ujian


A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si
Ketua


Drs. Uddin B Sore, SH., M.Si
Sekretaris

Tim Penguji

- 1. **Dra. Hj. Juharni, M.Si**
- 2. **Dr. Hj. Nurmi Nonci, M.Si**
- 3. **Drs. Uddin B Sore, SH., M.Si**
- 4. **Drs. Natsir Tompo, M.Si**


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena rahmat Karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi berbagai syarat guna memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa "45" Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi banyak kesulitan dan rintangan di sebabkan karena keterbatasan kemampuan yang di miliki. Namun berkat bantuan dan dorongan yang di berikan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan rencana.

Skripsi ini penulis Persembahkan kepada kedua orang tua saya yang telah ikhlas memberikan semangat dan pengorbanannya baik dari segi moril dan materi yang telah diberikan, beserta tak henti-hentinya mendoakan penulis agar penulis sukses dalam mengapai cita-cita. Terima Kasih telah meluangkan waktu untuk mengasuh, mendidik dan membimbing perjalanan hidup penulis yang di iringi doa yang begitu tulus huat kakak dan adik-adik penulis dan keluarga besar penulis terima kasih sudah memberikan semangat dan doa dalam penyelesaian study.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini penulis mengucapkan banyak terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:



1. Bapak Prof. Dr. Ir. HM. Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas “45” Makassar
2. Ibu Dra. Hj. Juharni, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa “45” Makassar
3. Bapak Andi Burchanuddin S.Sos, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
4. Bapak Drs. Uddin B Sore, SH.,M.Si, selaku ketua Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa “45” Makassar
5. Ibu Dr. Nurmi Nonci, M.Si. Dan Bapak Drs. Uddin B. Sore, SH., M.Si selaku Pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktunya untuk mengoreksi dan membimbing dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh pegawai Fisip Universitas Bosowa “45” makassar
7. Teman- teman seangkatan dan seperjuangan “ SOMASI 010” yang telah banyak memberikan perjalanan dan kebersamaan selama berada dalam masa perkuliahan
8. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Keluarga Besar Himpunan Administrasi Negara (HIMAN)

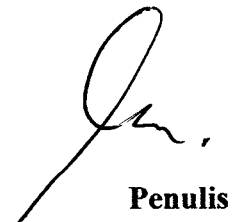


9. Bapak Kepala Camat Walenrang Utara Dan Kepala Kelurahan/Desa Beserta Masyarakat Walenrang Utara Kabupaten Luwu yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan fasilitas dalam pengumpulan data dan informasi yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini
10. Kepada kedua Orang Tua saya Bapak Ragga dan Ibu Rukaiyya, Beserta Kakak Saya Kasdir dan saudara-saudara saya dan semua keluarga yang tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan, bantuan dan doa restu selama penulis mengikuti kuliah sampai penulisan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan terutama bagi penulis dan semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya bagi kita semua ."Amin

Makassar, Maret 2015



Penulis

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Hasil Penelitian	5
BAB II TUJUAN PUSTAKA	
Landasan Teori	
A. Konsep Peran	6
B. Pegertian Koordinasi	6
C. Konsep Camat	21
D. Konsep Pembangunan	23
E. Konsep Kecamatan	24
F. Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.....	25
G. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.....	28

H. Kerangka Konseptual.....	31
-----------------------------	----

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Dan Dasar Penelitian.....	35
B. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	35
C. Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Teknik Analisis Data Yang Digunakan.....	45
F. Sistematika Penulisan.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Koordinasi Pemerintah Daerah (Camat) Dan Pemerintah Kelurahan /Desa Secara Vertikal Pada Sektor Pembangunan Infrastruktur.....	48
B. Faktor Penghambat Penerapan Koordinasi Aparat Pemerintah Kecamatan Walenrang Utara	67

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 3.1.	Jumlah Penduduk Di Kecamatan Walenrang Utara	
	Kabupaten Luwu.....	39
Tabel 3.2.	Komposisi Sarana Ibadah Di Kecamatan Walenrang	
	Utara.....	41
Tabel 4.1.	Koordinasi Camat Walenrang Utara Terhadap	
	Kepala Kelurahan / Desa	56
Tabel 4.2.	Koordinasi Camat Dan Aparat Kelurahan / Desa	
	Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan	
	Walenrang Utara.....	58
Tabel 4.3.	Koordinasi Pemerintah Kecamatan dengan Masyarakat	
	Dalam Keberhasilan Pembangunan DiKecamatan Walenrang	
	Utara.....	61
Tabel 4.4.	Dukungan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan	
	DiKecamatan Walenrang Utara.....	64

Tabel 4.5	Kelancaran Pembangunan DiKecamatan Walenrang Utara.....	66
Tabel 4.6.	Partisipasi Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan/Desa Dalam Proses Peningkatan Pembangunan.....	68
Tabel 4.7.	Komonikasi Pemerintah Dalam Menunjang Proses Pembangunan DiKecamatan Walenrang Utara.....	70
Tabel 4.8.	Kesamaan Tindakan Pemerintah dan Masyarakat Dalam Froses Pembangunan Yang Ada di Kecamatan Walenrang Utara.....	72
Tabel 4.9.	Pembiayaan Yang Dilakukan Pemerintah Kecamatan Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan Walenrang Utara.....	74
Tabel 4.10	Pemerintah Kecamatan Dalam Meningkatkan Mutu Pembangunan.....	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai lembaga pemerintahan yang berada di wilayah kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintahan kabupaten, diharapkan membawa Visi Misi pembangunan yang diembang dalam kurung waktu tertentu sebagai upaya pencapaian arah dan tujuan pembangunan disegala bidang sebagaimana tertuan pada rencana starategi. Olehnya itu semua stakeholder dituntut proaktif dan bekerja keras dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945 dalam upaya mensejahterakan rakyat, aparat sebagai pelayan masyarakat saat ini dituntut adanya kerjasama antar semua pihak yang terkait guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan dengan pola yang telah berjalan, dengan menyadari tantangan pemerintahan yang berjalan di Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

Dalam kaitannya dengan bidang Pemerintahan, usaha penyempurnaan Administrasi Pemerintahan pada semua Desa dan Kelurahan yang secara yuridis formal merupakan Pemerintahan dibawah Wilayah Kecamatan, yang merupakan tumpuan segenap pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu Pemerintah Wilayah harus bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembangunan di Wilayah Kecamatan dan juga harus berinisiatif, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan serta mampu dalam

pelaksanaan pembangunan. Olehnya itu untuk mencapai tujuan pembangunan disemua sektor diperlukan koordinasi dan kesungguhan dari aparat dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan menggerakkan masyarakat untuk turut serta berperan di dalamnya. Pengarahan dana dan daya tenaga secara efisien perlu dilakukan untuk menumbuhkan swadaya masyarakat karena hal itu ikut menentukan keberhasilan pembangunan sehingga dengan demikian pembangunan dengan sumber daya manusia perlu ditingkatkan secara maksimal.

Dalam peningkatan keterpaduan melalui pola koordinasi Pemerintah, keterbukaan dan pemberian hak desa dan kelurahan untuk membangun daerahnya dirasakan manfaat untuk kepentingan masyarakat. Namun demikian tidaklah sepenuhnya harapan itu bisa dinikmati oleh rakyat seutuhnya, berbagai kelemahan-kelemahann dijumpai termasuk kesiapan aparatur Kecamatan termasuk Sumber Daya Manusianya, koordinasi dengan bertumpu pada penyatuan persepsi dengan integritas dalam kesatuan tindakan dalam bekerja dan kesamaan gerak dalam bekerja ini belum maksimal, ditambah lagi adanya kecenderungan aparat dalam sbekerja sering muncul perbedaan dan penafsiran dalam melihat suatu kebijakan akhirnya akan menunjukkan belum tercermin kompetensi dalam menyelenggarakan sepenuhnya roda pemerintahan secara utuh.

Berangkat dari pernyataan di atas lembaga pemerintahan kecamatan masih ditemukan beberapa kelemahan-kelemahan dalam penyebaran pembangunan yang tentunya dibutuhkan kesiapan dalam menjalankan berbagai aktivitas pembangunan, yang harus dipahami bahwa aparat Kecamatan dalam menjalankan fungsinya

dituntut mampu mengkoordinasikan perencanaan pembangunan agar kiranya dapat seiring akan pelaksanaan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Aparat telah mengembang tugas dan tanggung jawab dalam Koordinasi dengan pemerintah baik pusat, daerah maupun pihak Kecamatan dimana didalamnya terdapat beberapa kelemahan-kelemahan dalam penyelenggaraannya termasuk kesadaran aparat akan pentingnya fungsi.

Berkaitan dengan usaha untuk mengsucceskan pembangunan nasional secara umum dan pembangunan Kecamatan, Kelurahan dan Desa secara khusus, diperlukan suatu kerjasama antara masyarakat yang merupakan obyek pembangunan maupun pemerintah sebagai subyek pembangunan tersebut.

Hal ini sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh secara adil dan merata, di mana salah satu faktor pendukung untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu peran koordinasi Camat secara menyeluruh, baik yang dimulai dari tingkat nasional (pusat) hingga ke tingkat Kecamatan.

Dalam rangka peningkatan mutu pembangunan Kecamatan ini maka peran serta keluarga, masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan Kecamatan. Untuk itu semua pihak utamanya pemerintah perlu berusaha menciptakan suasana lingkungan yang kondusif dan mendukung terwujudnya tujuan pembangunan itu sendiri, terutama dalam melakukan kerjasama serta koordinasi yang baik antara instansi terkait dengan masyarakat.



Berdasarkan paparan di atas, maka melihat kondisi yang ada di kecamatan Walenrang Utara berkaitan dengan upaya pemerintah kecamatan utamanya Camat Walenrang Utara dalam melaksanakan pembangunan, terutama dalam melaksanakan program dan kebijaksanaan pemerintah Kabupaten. Hal ini disebabkan karena di daerah kecamatan Walenrang Utara masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang sering menghambat pembangunan yang sangat penting untuk mendapat perhatian serius dari pihak pemerintah. Hal lain yang menjadi pengamatan penulis adalah penerapan fungsi Koordinasi aparat pemerintah Kecamatan, sehingga diangkat suatu penelitian sederhana dengan judul ” **Koordinasi Pemerintah daerah (Camat) Dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan DiDaerah Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Koordinasi aparat pemerintah pada Kantor Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dan solusinya para aparat dalam melaksanakan penerapan Koordinasi aparat pemerintah pada Kantor Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan tercapai dari penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui penerapan fungsi Koordinasi aparat pemerintah pada Kantor Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan yang dihadapi aparat dalam penerapan fungsi Koordinasi aparat pemerintah pada Kantor Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Terselenggaranya penelitian tentang penerapan fungsi koordinasi aparat Pemerintah pada Kantor Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu, sesungguhnya dapat memberikan berbagai manfaat antara lain :

1. Menjadi informasi kepada aparat yang bertugas dan kewenangan sedalam pemberian pelayanan pada masyarakat tentang manfaat penerapan fungsi koordinasi aparat Pemerintah pada Kantor Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu, dan dijadikan bahan evaluasi atas apa yang telah dilakukan.
2. Menjadi bahan masukan atau informasi kepada pihak yang berkewenangan menentukan kebijakan, dan dijadikan pedoman dalam penelitian selanjutnya tentang penerapan fungsi koordinasi Pemerintah aparat pada Kantor Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

A. Konsep Peran

Secara Estimologis kata peran artinya : pemain sandiwara, tukang lawak. Kata “Peran” biasanya diberi akhiran “an” maka menjadi “peranan” yang artinya sesuatu yang memegang pimpinan terutama atau karena hal atau peristiwa, Poerwadarminta W.J.S (1993:735). Dengan demikian kata “peran” berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memegang pimpinan atau karena sesuatu hal atau peristiwa. Jack C. Plano (1994: 20), mengemukakan bahwa peranan atau “Role : yaitu seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial.

B. Pengertian Koordinasi

Koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama. Terkait dengan hal-hal tersebut sebagai upaya untuk mensekresikan tugas bersama, tugas bagian-bagian, guna mewujudkan tujuan keseluruhan. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat diperinci unsur-unsur koordinasi yaitu sebagai berikut :

- a. Koordinasi mengandung arti sebagai suatu proses atau kegiatan secara terus-menerus tidak pernah berhenti.
- b. Mengandung upaya atau kegiatan untuk menyerahkan, menyelaraskan atau mensinkronisasikan unit-unit atau bagian atau tindakan di dalam suatu organisasi.
- c. Koordinasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dengan melalui upaya menghilangkan kekacauan serta tumpang tindih.

Berdasarkan ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa perhatian yang sangat besar dari Koordinasi Pembangunan Daerah terhadap upaya untuk menyelesaikan tugas dan tujuan keseluruhan sebagaimana yang tertuang dalam unsur-unsur koordinasi, dipandang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang dilaksanakan atas dasar perencanaan dengan perkataan lain, keberadaan koordinasi pembangunan Daerah merupakan wujud untuk pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut Soewarno Handayani, mengatakan bahwa : koordinasi adalah usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya. Dan beliau lebih lanjut mengatakan bahwa, koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling kait-mengait, karena koordinasi hanya dapat dicapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk komunikasi *administratif* yang

membantu tercapainya koordinasi (hubungan kerja) ialah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil dan berdaya guna (efektif dan efisien).

Dari pengertian koordinasi dan hubungan kerja tersebut diatas, dapatlah diketahui betapa besarnya peranan koordinasi dalam melaksanakan Pemerintahan, yaitu agar tercapainya kesatuan tindakan antara unit-unit dari organisasi yang satu dengan yang lainnya, sehingga apa yang diinginkan tercapai secara berdaya guna dan berhasil guna. Apabila dianalisa lebih lanjut dari pengertian koordinasi, maka dapat dikemukakan ciri-ciri koordinasi itu, yaitu sebagai berikut :

a. Tanggung jawab koordinasi berada pada Pimpinan

Oleh karena itu koordinasi adalah wewenang dan tanggung-jawab dari pada pimpinan. Dikatakan pimpinan yang berhasil apabila melakukan koordinasi dengan baik.

b. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama

Hal ini disebabkan karena kerja sama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi sebaik-baiknya.

c. Koordinasi adalah proses yang terus-menerus

Artinya suatu proses yang bersifat berkesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.

d. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur

Hal ini disebabkan karena koordinasi adalah konsep yang diterapkan dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang berkerjasama didalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

e. Konsep Kesatuan tindakan

Kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha atau tindakan-tindakan dari pada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian didalam mencapai hasil bersama.

Dengan adanya koordinasi pembangunan tersebut diatas, maka rencana-rencana pembangunan yang diusulkan tadi diharapkan dapat terlaksana dengan baik serta mengandung nilai yang objektif, dengan demikian diperoleh suatu rencana pembangunan Daerah yang terarah, terpadu sesuai dengan pola pembangunan Daerah.

Searah dengan hal diatas, oleh Mooney and Reily yang dikutip oleh Suwarno Handayadiningrat mendefenisikan koordinasi sebagai berikut :

“Coordination as the achievement of orderly group effort, and unity of action in the pursuit of a common purpose koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur kesatuan tindakan didalam mencapai tujuan bersama”.

Jadi makna defenisi di atas menunjukkan usaha penyesuaian langkah dari berbagai fungsi, sehingga efisiensi pencapaian tujuan dapat dicapai. Dalam bidang pemerintahan dan pembangunan, pelaksanaan koordinasi diarahkan adanya integrasi dalam kesatuan tindakan yang serasi, seirama, selaras sama lain dalam penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan.

Koordinasi merupakan usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan dari satuan kerja, sehingga segala aktivitas bergerak sebagai kesatuan yang bulat untuk mencapai tujuan. Maka jelas bahwa koordinasi mengandung adanya keterpaduan dan dilakukan secara serasi dan simultan dari seluruh tindakan yang dilakukan.

Untuk memperjelas arti dan pengertian dari koordinasi itu sendiri dibawah ini akan penulis kemukakan beberapa pendapat ahli. Menurut Henry Fayol yang dikutip oleh Sutarto bahwa :

”Mengkoordinasikan berarti mengikat bersama, menyatukan menselaraskan semua kegiatan dan usaha. Kemudian menurut Harold Koonta & Cyril O’Donnel dalam bukunya yang sama dikatakan bahwa “Koordinasi; pencapaian keselarasan usaha individu dalam usaha mencapai tujuan serta sasaran kelompok”.

Pendapat lain, seperti yang dikemukakan oleh G.R.Terry bahwa:

“Koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan kepastian kuantitas, waktu dan pengarahannya pelaksanaan yang menghasilkan keselarasan dan kesatuan tindakan untuk tujuan yang telah ditetapkan”.

Dari berbagai intisari tentang koordinasi seperti tersebut di atas sebenarnya dapat dipakai istilah yaitu keselarasan. Baik kesatuan tindakan, kesatuan usaha, penyesuaian antar bagian, keseimbangan antar bagian maupun sinkronisasi kesemuanya bersasaran keselarasan.



Selanjutnya oleh Suwarno Handayani grat menekankan betapa pentingnya peranan koordinasi dalam pembangunan. Apabila fungsi koordinasi itu dikaitkan dengan fungsi pimpinan maka ia akan mencakup wawasan yang lebih luas lagi, koordinasi dalam kepemimpinan administrasi akan mencakup aktifitas seorang pimpinan dalam mempengaruhi perilaku orang lain dalam organisasi. Akan menyangkut kemampuan dalam mengambil keputusan dan perumusan dalam pemecahan masalah yang manusiawi dengan meningkatkan keterpaduan dengan unit kerja lainnya. Adapun pengertian koordinasi menurut beliau ialah :

“Koordinasi ialah konsep dasar kedua disamping kepemimpinan (leadership). Sebab koordinasi dan kepemimpinan adalah tidak bisa dipisahkan satu sama lain saling mempengaruhi. Kepemimpinan yang efektif adalah menjalin koordinasi yang baik, sebab pemimpin berperan sebagai coordinator”.

Apabila ditelusuri lebih mendalam makna koordinasi tersebut, maka hakekat koordinasi yang aktif adalah senantiasa diarahkan pada tercapainya.

- a. Kesamaan gerak dan langkah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, hal ini merupakan inti koordinasi.
- b. Mencegah terjadinya perbedaan dan penafsiran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- c. Merupakan alat pendekatan personal dalam hubungannya dengan pendekatan yang bersifat lintas sektoral dan multi dimensional dari setiap kegiatan.

Dari uraian tersebut menunjukkan betapa pentingnya peranan koordinasi bagi seorang pimpinan terutama dalam hal menciptakan asas keselarasan dan

keseimbangan dalam mewujudkan tujuan secara berdaya guna dan berhasil guna. Betapa pentingnya fungsi koordinasi dalam rangka keterpaduan pembangunan daerah termasuk daerah pedesaan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Koordinasi yang baik membawa dampak positif terhadap peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.
- b. Koordinasi yang efektif memberikan kontribusi yang baik guna tercapainya tugas-tugas yang bersifat khusus dan spesifik.
- c. Melalui koordinasi yang baik akan merupakan suatu alat ukur bagi keberhasilan terutama menyangkut hal-hal yang bersifat multi dimensional.

1. Pengertian Pemerintahan Kecamatan

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan memerlukan adanya seorang Pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata (Budiman, 1995:4). Kecamatan merupakan line office dari Pemerintah Daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina Desa/Kelurahan. Kecamatan merupakan sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan perangkat Kecamatan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta Tugas dan fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

A. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Camat dalam menjalankan tugas dan kewajiban dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, dan Staf. Untuk menyelenggarakan tugas tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Adapun Fungsi Camat sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa.
- g. Pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan.

- h. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan dalam kependudukan.
- j. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dalam pengembangan partisipasi masyarakat.
- k. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.
- l. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Instansi Pemerintahan lainnya yang berada di Wilayahnya.
- m. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.
- n. Pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan/atau rumah tangga Kecamatan.
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris Kecamatan

Rincian tugas pokok, fungsi dan Tata kerja Kecamatan Sekretaris mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, Kepegawaian,

perencanaan pembangunan di segala bidang dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan Organisasi Kecamatan Walenrang Utara. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris memiliki fungsi. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pendataan rencana dan program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan.
- e. Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi.
- f. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.
- g. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di Wilayahnya.
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.
- i. Koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan Prasarana dan fasilitas pelayanan umum.



- j. Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan Prasarana dan fasilitas pelayanan Umum.
- k. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan Prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Wilayah Kecamatan.
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

C. Seksi Tata Pemerintah

Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Tata Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas untuk melakukan urusan Pemerintahan dan pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan. Untuk menjalankan tugasnya seksi tata Pemerintahan memiliki fungsi yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Fungsi seksi tata pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang Pemerintahan.
- b. Penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan.
- c. Fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

- e. Pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari Wilayah kerjanya.
- f. Pelaksanaan Koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan Instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan.
- g. Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan.
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan.
- i. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan
- j. Penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan Desa/Kelurahan.
- k. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi Pemerintahan Desa atau Kelurahan.
- l. Administrasi Desa atau Kelurahan ;
- m. Pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa atau Kelurahan beserta perangkat Desa atau Kelurahan.
- n. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan Desa atau Kelurahan di tingkat Kecamatan. Dan

- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

D. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat.
- b. Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat.
- d. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan.
- e. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerjabaikpemerintah maupun Swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan.
- g. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di Wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja Pemerintah maupun swasta.

- h. Koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan kelautan, perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah.
- i. Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

E. Seksi Kesejahteraan Sosial

Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial yaitu :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang kesejahteraan sosial.
- b. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan.
- c. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang Sosial Budaya, Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- d. Penanganan bencana alam dan bencana Sosial.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial di Wilayah kerjanya.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

2. Desa dan Kelurahan.

Desa dan Kelurahan adalah Wilayah Pemerintahan Kecamatan sebagai Lembaga koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dengan segala kemampuan akan selanjutnya tergantung atas kemampuan aparat membina dan mengembangkan suatu administrasi yang memecahkan masalah-masalah dalam pembangunan Desa dan Kelurahan dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat, oleh karena itu dalam perkembangan administrasi pemerintahan merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur Pemerintah terhadap pembangunan, termasuk pembangunan di daerah pedesaan dan Kelurahan kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin, materi maupun spiritual.

Oleh Bintaro Tjokroamidjojo, dkk mengungkapkan bahwa proses pembangunan sebenarnya :

“adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri (self sustening proces) tergantung kepada manusia dan struktur sosial”

Untuk mengadakan perubahan sosial budaya masyarakat, maka sudah menjadi kewajiban seluruh aparat Pemerintah dan masyarakat sendiri untuk menciptakan dan memperluas serta melaksanakan program-program pembangunan nasional yang diselenggarakan termasuk penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh aparat Pemerintah Desa dan Kelurahan. Dengan demikian maka harus mutlak melaksanakan administrasi pemerintahan dalam menunjang keberhasilan pembangunan Desa dan Kelurahan.

C. Konsep Camat

Menurut Bayu Suryaningrat (1981) Camat adalah seseorang yang mengepalai dan membina suatu Wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa Desa atau Kelurahan. Camat juga seorang eksekutif yaitu seorang pelaksana tugas pemerintahan, seperti salah satu tugas dan fungsinya sebagai kepala Wilayah Kecamatan yaitu pengendalian pembangunan. Di samping itu juga Camat menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2008 tentang Kecamatan dalam menyebutkan bahwa :

1. Kecamatan dibentuk di Wilayah Kabupaten/Kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.

3. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah meliputi :
 - a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan;
 - f) Membina penyelenggaraan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan.
 - g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan.
4. Kepala Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atau usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Camat dalam hal menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) dibantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota;
6. Perangkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Camat;

7. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan peraturan Bupati atau Walikota dengan berpedoman.

D. Konsep Pembangunan

Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu paling tepat mengartikan pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik, pandangan marksis, modernisasi dan lain-lain. Pembangunan dapat di artikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga Negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.

Maksud dari manusiawi tersebut mengandung tiga tema utama yang perlu diketahui dalam pembangunan yaitu:

1. Koordinasi yang berimplikasi pada perlunya secara sah.
2. Terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada beragaman dalam seluruh aspek kehidupan.
3. Mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat. (Nugroho dan Danuri 2004:9).

Pembangunan merupakan suatu kegiatan pembangunan yang dilakukan secara sistematis dengan melibatkan semua elemen masyarakat dilaksanakan secara terpadu untuk mencapai tujuan dalam rangka kemakmuran masyarakat. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan taraf hidup, dari yang kurang mampu secara ekonomi menjadi lebih mampu. Setiap organisasi apapun bentuk dan tujuannya senantiasa berupaya mengejar suatu tingkat efektifitas dalam menyelenggarakan misinya. Jika penyelenggaraan pemerintahan didekati melalui penerapan teori-teori organisasi, maka dengan sendirinya tak dapat disangkal bahwa efektifitas merupakan suatu prinsip yang harus dianut disamping efisiensi dan rasionalitas. Sebagai organisasi modern, pemerintahan Wilayah Kecamatan Walenrang Utara juga mengajar tingkat efektifitas yang sebaik mungkin dalam penyelenggaraan pemerintahannya, karena tingkat efektifitas itulah yang menentukan tingkat pencapaian tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

E. Konsep Kecamatan

Wilayah Kecamatan mempunyai batas-batas tertentu, Wilayah ini ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan dibawah Kabupaten yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 126 :



1. Kecamatan dibentuk di Wilayah Kabupaten/Kota dengan Perda berpedoman pada peraturan pemerintah.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

F. Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Pembangunan nasional merupakan perwujudan tujuan nasional bangsa Indonesia pada intinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan nasional yang dilaksanakan pada hakekatnya mencakup semua aspek kehidupan manusia yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta menyeluruh keseluruhan pelosok tanah air.

Agar pembangunan nasional sesuai dengan sasaran, maka pelaksanaannya dapat diarahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan pembangunannya sendiri. Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, sudah barang tentu memerlukan pengorganisasian pemerintah yang mampu mengikuti perkembangan jaman. Pelaksanaan pembangunan yang ditujukan demi kemakmuran rakyat tersebut, penyelenggaraannya dilakukan menyeluruh sampai

ke pelosok daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dengan kata lain bahwa negara memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi.

- a. Dalam gerak pelaksanaannya sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian sekarang undang-undang tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut dalam substansinya juga mengalami perubahan, namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
- b. Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat.

- c. Perubahan paradigmatik penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 120 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yakni, "Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan".
- e. Sejalan dengan itu, Camat tidak lagi ditempatkan sebagai Kepala Wilayah dan Wakil Pemerintah Pusat seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, melainkan sebagai perangkat daerah. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Koeswara Kertapradja, Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah

dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan. Sedangkan dalam Pasal 126 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Camat memiliki kewenangan untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang dimaksud membina dalam ketentuan ini adalah dalam bentuk fasilitasi pembuatan peraturan desa dan terwujudnya administrasi tata pemerintahan yang baik.

G. Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa

Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Namun, tugas tersebut tidak dengan serta merta memposisikan Camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu.

Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah, tugas-tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh Camat, meliputi

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan.

Selain melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan di atasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek Perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan. Pelimpahan sebagian wewenang ini dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. Eksternalitas yang dimaksud adalah adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan camat. Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup kecamatan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan camat

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 102, mengisyaratkan bahwa Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan. Pembinaan dan pengawasan tersebut, meliputi :

1. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
2. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
3. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
4. Memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa;
5. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
6. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
7. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
8. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
9. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
10. Memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
11. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
12. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
13. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan

14. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

H. Kerangka konseptual

Penelitian dalam kegiatan operasional berdasarkan asumsi penelitian pada beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Wujud dalam keberadaannya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, dituntut untuk mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya yaitu tugas penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dari berbagai bidang pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan. Peningkatan kemampuan aparatur Negara semakin penting. Arah dan bentuk kebijakan Pemerintah khususnya pada, didasarkan pada tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang kegiatan. Olehnya itu dituntut profesional dan loyalitas atas tugas yang telah diberikan terkait dengan upaya penerapan fungsi koordinasi aparat Pemerintah untuk menata perencanaan pembangunan diberbagai bidang dalam Wilayah Pemerintahan Kecamatan.
2. Bahwa untuk menunjang tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan untuk merealisasikan program Pemerintah baik pembangunan fisik maupun pembangunan dalam rangka pemberdayaan masyarakat maka diperlukan penerapan fungsi Koordinasi yang baik yaitu; integritas dalam kesatuan tindakan, kesamaan gerak, pencegahan terjadinya perbedaan dan penafsiran

dan pendekatan personal yang sifatnya lintas sektoral dan multi dimensional dalam upaya untuk mensingkrongkan apa yang menjadi harapan dan kebutuhan masyarakat terkait dengan perencanaan pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, menginvetaris hasil musyawarah pembangunan desa dan kelurahan, ada jaminan ketertiban dan keamanan masyarakat serta penyelesaian kebutuhan administrasi masyarakat. Olehnya itu koordinasi yang dimaksudkan adalah adanya kesepakatan hal-hal yang urgen yang terjadi dilingkungan masyarakat, dan koordinasi ini dilakukan secara berkesinambungan.

3. Indikator Kualitas penerapan fungsi koordinasi dalam hal ini, meliputi pengetahuan tentang pekerjaan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, kemampuan membuat perencanaan dan jadwal pekerjaan, pengetahuan tentang standar mutu pekerjaan yang disyaratkan, produktivitas aparat/pegawai yang berkaitan dengan hasil hasil pembangunan baik sifatnya koordinasi langsung maupun tidak langsung.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas penulis melakukan penelitian dengan menganalisis beberapa faktor pendukung terhadap Penerapan fungsi koordinasi aparat Pemerintah pada kantor Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu, dilihat dari sudut Perencanaan pembangunan, hasil musrembang, peningkatan kesejahteraan rakyat, ketertiban dan keamanan dan jaminan kebutuhan administrasi masyarakat. Hal ini dapat dicapai manakala koordinasi terus ditumbuhkan dan dikembangkan antara Pemerintah

Kelurahan dan Desa serta Pemerintah Wilayah Kecamatan dengan lembaga kemasyarakatan.

Dari kerangka konseptual diatas, maka dapat digambarkan dalam bentuk bagan untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian dan pembahasan sebagai berikut :



Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Dan Dasar Penelitian

1. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kuantitatif yaitu dengan maksud untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang pelaksanaan koordinasi dalam keberhasilan pembangunan dikecamatan walenrang utara. melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti bersifat sebab dan akibat sehingga dalam penelitian bersifat independen dan dependen. Dari variabel tersebut selanjutnya dicari seberapa besar pengaruh independen terhadap variabel dependen adapun variabel indeviden dalam penelitian ini adalah koordinasi pemerintah daerah sedangkan variabel dependennya adalah keberhasilan pembangunan
2. Dasar peneitian yang dilakukan adalah wawancara dan kuesioner (*Angket*) yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data melalui daftar pertanyaan dari sejumlah responden yang dianggap mewakili seluruh populasi.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Berdasarkan pada judul peneliti maka penelitian dilaksanakan di Kecamatan, Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

a. Letak Dan Luas Wilayah penelitian

Walenrang Utara adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten LUWU, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis Walenrang Utara terletak dibagian Utara Ibukota Kabupaten Luwu (Belopa). Jarak dari Ibukota Kabupaten kurang lebih 84 KM dan diantarai oleh kota Madya Palopo dibagian Utara. Walenrang Utara terbagi atas 11 desa yaitu, Desa Sangtangdung, Desa Bolong, Desa limbong, Kelurahan Bosso, Desa Bosso Timur, Desa Buntuawo, Desa Marabuana, Desa Siteba, Desa Salulino, Desa Salutubu, dan Desa Pongko. Jumlah penduduk Walenrang Utara kurang lebih 17.729 penduduk setempat. Masyarakat Walenrang Utara mayoritas menganut agama Islam dan gaya bahasa sehari-hari mereka menggunakan bahasa daerah khas Luwu. Masyarakat Walenrang Utara masih memegang teguh adat budaya mereka. Masyarakat setempat menyebutnya "Massengo" atau tari Sajo langkah-langkah yang diiringi lagu tari Sajo langkah-langkah itu sendiri. Tarian ini digunakan pada saat penyambutan Datu Luwu dan Kepala Daerah setempat maupun acara-acara ke Daerahan Walenrang Utara.

Potensi yang dimiliki Walenrang Utara adalah pertanian, khususnya lahan persawahan. Hasil panen padi mereka sebagian besar dibeli oleh pengusaha beras dari luar daerah salah satunya dari daerah Sidrap. Selain potensi pertanian, masyarakat setempat sehari-harinya "Massambe" (membuat sagu), dan mengambil daun sagu kemudian diolah dengan cara dijahit dan digunakan sebagai atap rumah masyarakat dan sebagian besarnya dijual ke

para pengusaha atap untuk dibawa ke daerah Toraja dan Duri. Selain potensi pertanian masyarakat Walenrang Utara memiliki lahan tanah perkebunan yang sangat subur, jadi selain bertani masyarakat setempat juga berkebun, mereka juga memelihara Ternak seperti, Sapi, Kambing, Kerbau, Ayam, Bebek dan Mentok.

Luwu adalah singkatan dari perkataan bugis 'riulo'. artinya diulur, kemudian dihamparkan dan ditaburi atau diperlengkapi dengan kekayaan alam yang melimpah-limpah, dan menjadi satu daerah atau kerajaan Pusaka (ongko) untuk Datu yang konon pertama menjeima di kampung Sabbangparu, satu tempat yang terletak dalam lingkungan kota Palopo. "*LUWU*" *makkebettuangngi punnai usoro, riebarai makkunrai, madeceng abbatireng, madeceng ngampe napatumaningi*". Artinya : Luwu mengandung arti mempunyai sifat-sifat yang baik. Dia diumpamakan seorang wanita yang baik asal usulnya, baik perangainya dan patuh berbakti". Perkataan baik asal usulnya (madeceng abbatireng), baik perangainya (madeceng ampe), patuh berbakti (napatumaningi), mengandung pengertian bahwa Kerajaan Luwu adalah suatu daerah yang sangat subur tanahnya dan mempunyai banyak kekayaan, baik yang ada diatas permukaan huminya maupun yang masih didalam perut bumi. Kekayaan alamnya yang banyak itu maka dapatlah daerah itu secara "patuh berbakti" memberi kemakmuran hidup pada manusia.

Kecamatan Walenrang Utara merupakan Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Luwu. Secara geografis, Kecamatan Walenrang Utara memiliki



jarak sekitar 84 km dari ibukota kabupaten dan berjarak sekitar 400 km dari ibukota propinsi. Kecamatan Walenrang Utara terletak di Kelurahan Bosso sebagai Ibu Kota Kecamatan yang memiliki luas Wilayah 269,27 km² dengan koordinat Geografis berada pada 120⁰⁰'00''-120⁰⁸'00'' LS -2⁰⁴'00'' - 2⁰⁵²'00'' BT. 22

Batas-batas Wilayah Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Walenrang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lamasi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Barat.

Secara administratif Kecamatan Walenrang Utara terdiri dari satu Kelurahan dan sepuluh Desa yaitu, Kelurahan Bosso sebagai Ibukota Kecamatan, Desa Sangtandung , Desa Bolong, Desa Bosso, Desa Buntu Awo, Desa Marabuana, Desa Siteba, Desa Saluino, Desa Salutubu, Desa Pongko, Desa Limbong, Desa Bosso Timur.

b. Keadaan Demografis

Kondisi kependudukan (demografi) merupakan hal yang harus menjadi perhatian pihak pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk merupakan suatu gambaran tentang kependudukan pada suatu Wilayah secara kuantitatif yang dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan Wilayah dalam konteks

pembangunan agar tepat sasaran. Jumlah penduduk di Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu yaitu 17.729 jiwa yang terdiri dari 8.904 orang laki-laki, dan 8.825 orang perempuan. Adapun jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin serta seks ratio di Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu dapat dilihat pada Tabel

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk di Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu Dirinci Menurut Jenis Kelamin Akhir Tahun 2013

Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Sangtandung	687	626	1313
Bolong	1301	1300	2601
Bosso	918	907	1825
Buntuawo	853	832	1690
Marabuana	609	629	1238
Siteba	659	593	1252
Salulino	694	690	1384
Salutubu	1118	1145	2263
Pongko	1228	1230	2458
Limbong	384	386	770
Bosse timur	453	482	935
Jumlah	8.904	8.825	17.729

Sumber pusat statistic walenrang utara kabupaten luwu 2013

Tabel 1. menunjukkan jumlah penduduk di Kecamatan Walenrang Utara yang berjenis kelamin perempuan hampir sebanding dengan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki yaitu 8.904 : 8.825 jumlah penduduk yang ada tersebut merupakan salah satu faktor pendukung dalam pengembangan subsektor pembangunan sebagai sumber tenaga kerja

1. Agama

Wilayah Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu mayoritas masyarakat memeluk agama islam sesuai dengan data kependudukan yang ada di Kecamatan Walenrang Utara yakni masyarakat yang menganut agama islam sekitar 96% sesuai dengan data peribadaan Walenrang Utara tahun 2013 dapat dilihat pada tabel :

Table 3.2
komposisi sarana ibadah kecamatan walenrang utara

No	Desa/kelurahan	Mesjid	Gereja
1	Desa sangtandung	3	-
2	Desa bolong	3	-
3	Kelurahan bosso	5	-
4	Desa buntuawo	3	-
5	Desa marabuana	3	2
6	Desa siteba	2	-
7	Desa salulino	4	1
8	Desa salutubu	2	1
9	Desa pongko	2	1
10	Desa limbong	2	-
11	Desa bosso timur	3	-
	Jumlah	32	5

Sumber : laporan data profil kecamatan walenrang utara 2013

2. Kesehatan

Secara umum kondisi kesehatan di walenrang utara kabupaten luwu sudah terbilang baik atas tersedianya prasarana kesehatan di kecamatan walenrang utara ada beberapa sarana dan prasaran di kecamatan walenrang utara (berdasarkan berdasar kan laporan dan profil kecamatan walenrang utara

Puskesmas : 6 unit.

- Posyandu : 2 unit.
Bidan desa : 8 orang.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan peneliti adalah dalam penelitian ini selama 1 bulan untuk mengumpulkan semua data. Dengan demikian untuk mengetahui bagaimana koordinasi Camat dalam menunjang keberhasilan pembangunan yang ada dikecamatan walenrang utara kabupaten luwu

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari populasi dan sampel yang dianggap mampu memberikan informasi yang akurat dan dikelola oleh peneliti

i. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Mengikuti fokus dari penelitian ini adalah bagaimana peran koordinasi Camat dalam menunjang keberhasilan pembangunan khususnya di Kecamatan Walenrang maka menjadi objek penelitian aparat pemerintah kecamatan dan desa sebanyak 6 orang dan 30 orang sebagai responden

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti karna jumlah populasi yang akan diteliti ada 36 orang maka semuanya akan dijadikan

sampel atau dilakukan dengan sampel jenuh adapun rinciannya sebagai berikut

➤ : Sampel

- Camat Walenrang Utara: 1 Orang
 - Kepala Desa : 5 Orang
 - Masyarakat yang ada di kecamatan walenrang Utara 30 Orang
- jumlah keseluruhan 36 Orang

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data-data yang diambil dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang bersumber dari kepustakaan (library Study), sedangkan data primer adalah data yang bersumber dari studi lapang (Field Research).

1. Studi lapang yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data-data yang akurat mengenai objek yang diteliti dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :
 - a. Teknik *interview* atau wawancara yaitu melakukan wawancara baik secara mendalam maupun secara bebas kepada subjek penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan.
 - b. Teknik *Observasi* yaitu dengan melakukan pengamatan langsung untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan yang terjadi..

c. Kuesioner Yaitu dengan mengedarkan daftar pertanyaan kepada sejumlah responden yang telah ditentukan untuk mendapatkan jawaban atas sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Data sekunder

Data diperoleh melalui studi pustaka (*Library Search*) yaitu mengambil data dari sejumlah buku, literatur, internet, dokumentasi maupun perundang-undangan, dokumen yang sudah ada, seperti, Profil Kecamatan walenrang utara dan beberapa data penting lainnya.

Dalam penelitian ini terdapat tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara berstruktur dan tidak berstruktur angket/qusioner Untuk pengumpulan data dan informasi dilapangan ditempuh beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

A. Obesrvasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung dilapangan terutama berkaitan dengan data penelitian yang diperlukan, sedangkan yang di observasi dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan fungsi koordinasi aparat Pemerintah Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

B. Wawancara

Kegiatan wawancara terhadap informasi, peneliti menggunakan pedoman wawancara dan program observasi. Pedoman wawancara menjadi pemandu dalam perolehan data. Namun wawancara tidaklah

terfokus pada pedoman tersebut, tetapi akan dikembangkan sesuai kondisi lapangan pada saat wawancara berlangsung.

Bentuk wawancara yang dilakukan adalah wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur, wawancara berstruktur dilakukan untuk memperoleh data pokok tentang penerapan fungsi koordinasi aparat Pemerintah pada Kantor Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu serta wawancara tak berstruktur dilakukan secara bebas untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara berstruktur.

C. Angket / kuesioner

Yaitu memperoleh data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian secara terperinci dan akurat dari responden dengan mengedarkan daftar pertanyaan berdasarkan permasalahan penelitian

E, Teknik Analisis Data Yang Digunakan

Teknik analisis data yang digunakan adalah dari olah data Angket/ kuisuner dan hasil wawancara peneliti dilokasi penelitian yang dilakukan secara struktur dan tak berstruktur. Pendekatan yang digunakan dalam pengolahan data adalah model penelitian yaitu rasional empiris, setelah pengumpulan dan penggalan informasi atau data adalah tahap analisis data. Dalam penelitian ini, analisis terhadap data menggunakan desain analisis atau pendekatan yang digunakan

yaitu analisis deskriptif dengan menggunakan tabel frekuensi dan tabel akumulatif penggunaan tabel didasarkan pada jenis variabel dan kepentingan analisis.

Adapun alat analisis yang dimaksud adalah:

$$\text{Presentase} = \frac{F}{N} \times 100 \% \text{ Sugiono}$$

Di mana :

P	= Presentase
F	= Jumlah jawaban responden
N	= Jumlah responden

F. Sistematika Penulisan

Secara singkat mengenai gambaran susunan penelitian proposal ini disusun V BAB, dimana diantara BAB I dengan yang lainnya saling berkaitan sehingga tercermin suatu sistematika yang utuh terpadu, sistematika pembahasan dari BAB-BAB tersebut adalah sebagai berikut :

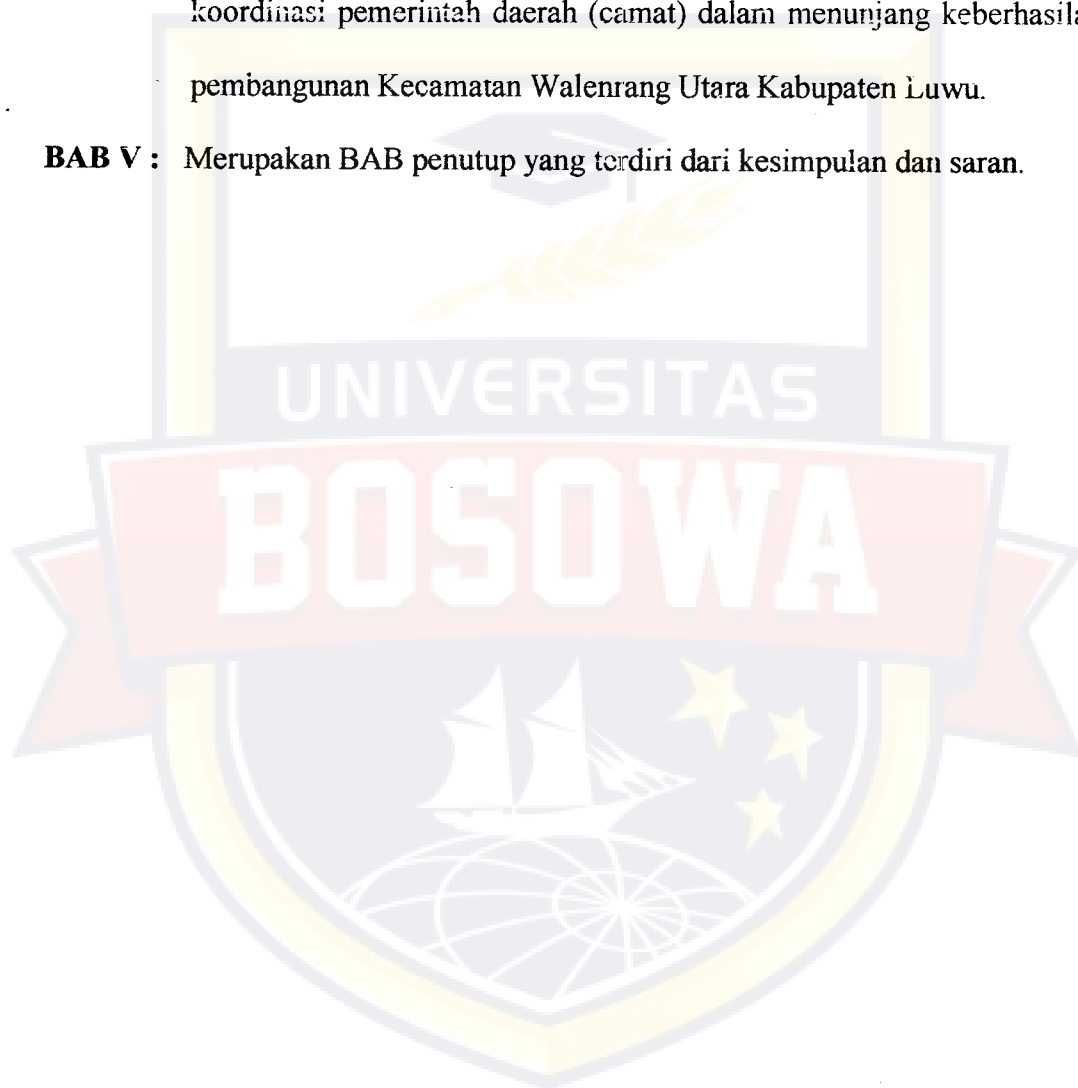
BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat hasil penelitian, kerangka konseptual dan metodologi penelitian.

BAB II : Tujuan pustaka yang terdiri dari landasan teori konsep peran, pengertian koordinasi, konsep Camat, konsep pembangunan, konsep Kecamatan.

BAB III : Gambaram umum penelitian yang terdiri dari keadaan geografis dan keadaan demografis.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari karesteristik responden, koordinasi pemerintah daerah (camat) dalam menunjang keberhasilan pembangunan Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

BAB V : Merupakan BAB penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Koordinasi Pemerintah Daerah (Camat) Dan Pemerintah Kelurahan/Desa Secara Vertikal Pada Sektor Pembangunan Infrastruktur

Koordinasi mempunyai arti yang sangat penting dalam pembangunan hal ini disebabkan karna pelaksanaan melibatkan satu instansi pemerintahan adapun koordinasi dalam penelitian ini akan dibahas mengenai koordinasi vertikal. Koordinasi vertikal adalah koordinasi yang dilakukan oleh kepala camat dan kepala kelurahan/ desa. Camat dalam melakukan kewenangannya senantiasa mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan para kepala kelurahan/desa atau melakukan rapat koordinasi sehingga masing-masing pihak dapat mengetahuinya dengan menjalankan tugas dan fungsinya. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

1. Pembangunan infrasturuktur jalan dan jembatan

Infrastruktur memegang peran penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan sama halnya infrastruktur jalan dan jembatan. Keterbatasan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menyebabkan melambatnya laju investasi.

Tahun 2008 pemerintah mencurahkan perhatian lebih pada infrastruktur jalan dan jembatan demi mengejar target pertumbuhan 6,8% mendorong laju investasi, dan menggerakkan sektor riil, anggaran yang dikeluarkan pun membengkak hingga puluhan persen dari tahun sebelumnya. Pemerintah mengalokasikan anggaran bagi departemen PU sebesar Rp 36,6 triliun atau naik 41,4% dibandingkan dengan perkiraan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Negara perubahan (APBN-P) tahun 2007 anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk program peningkatan pembangunan infrastruktur jalan

Pasal 1 angka 4 UU No 38 tahun 2004 tentang jalan memberikan definisi mengenai jalan yaitu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah.

Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penyelenggara jalanan sebagai mana diamanatkan pada pasal 13 UU No. 38 tahun 2008 tentang jalan mempunyai kewajiban wajib memprioritaskan pemeliharaan jalan perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalanan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu proses aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga merupakan peran penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi ini mengigit gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur pembangunan jalan dan jembatan.

Pembangunan infrastruktur daerah harus sejalan dengan harus sejalan dengan kondisi makro ekonomi daerah yang bersangkutan. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di daerah tertentu harus mendapatkan perhatian serius karena faktor terbesar yang dihadapi pembangunan selama ini adalah buruknya kualitas pembangunan kualitas pembangunan infrastruktur khususnya di daerah berbagai upaya untuk mengatasi kondisi tersebut terus dilakukan salah satunya adalah dengan akselerasi pembangunan infrastruktur daerah guna mengejar ketertinggalan daerah dengan pusat yang tertinggal dengan daerah lain. Sesuai dengan hasil penelitian peneliti lapangan terhadap pembanguana dikecamatan walenrang utara.

Secara umum koordinasi dapat diartikan sebagai usaha untuk mengatur dan menyalurkan setiap pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama oleh beberapa orang dalam rangka mencapai tujuan. Dengan kata lain koordinasi merupakan penyaluran secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-

kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama dalam hal pembangunan .

Untuk menyalurkan kegiatan antara unit yang satu dengan unit yang lainnya perlu dilakukan suatu koordinasi, kurangnya pengertian, pemahaman, serta dukungan dalam pelaksanaan koordinasi dapat mengakibatkan terjadinya perselesihan dan saling tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Sebaliknya apabila koordinasi berjalan dengan baik akan dapat menciptakan keharmonisan dan kerja sama yang baik.

Koordinasi mempunyai arti penting dalam pembangunan, hal ini disebabkan karena pelaksanaannya melibatkan lebih dari satu instansi pemerintah. Adapun pelaksanaan koordinasi dalam penelitian ini akan dibahas mengenai koordinasi pemerintah dalam hal keberhasilan pembangunan. koordinasi yang dilakukan oleh Camat dengan para Kepala kelurahan/Desa. Camat dalam menggunakan kewenangannya senantiasa mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan para Kepala Kelurahan/Desa atau mengadakan rapat koordinasi , sehingga masing – masing pihak dapat mengetahui dan menjalankan tugas dan fungsinya. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui sekretaris daerah. Dari wawancara dengan pegawai kecamatan bagian pemerintahan, mengatakan ada pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pencapaian eektivitas pembangunan



Pada hakekatnya pembangunan adalah merupakan proses pertumbuhan yang terus menerus dan perbaikan menuju kearah tercapainya tujuan yang diinginkan oleh karna itu sebagai perwujudan tujuan akhirnya pembangunan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 ditengah mewujudkan masyarakat yang sejahtera salah satu yang menjadi tolak ukurnya adalah dari segi pembangunan yang ada. Pembangunan dalam hal membentuk karakter dan pola pikir masyarakat mampu dari segi pembangunan fisik infrastruktur yang ada dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada masa berlakunya UU No 5 tahun 1974, Camat merupakan kepala wilayah pada pasal 76 dinyatakan setiap Wilayah dipimpin oleh seorang kepala wilayah, dalam pasal 77 dinyatakan bahwa kepala wilayah kecamatan disebut Camat. Dalam pasal 80 dinyatakan kepala Wilayah sebagai wakil pemerintah adalah penguasa tunggal dibidang pemerintahan dalam wilayah dalam arti memimpin pemerintahan mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang, wewenang, tugas dan kewajiban kepala wilayah lainnya yakni gubernur, bupati, dan wali kota. Keberhasilan dari pada Camat didalam melaksanakan tugasnya dalam menunjang keberhasilan pembangunan tergantung juga bagaimana teknik, cara desainnya dari pada seorang Camat selaku pemimpin wilayah dalam bidang pembangunan tidak hanya dipandang dari segi fisik tetapi dari mutu dan kualitasnya pembangunan itu sendiri. Untuk itu dibutuhkan adanya

kemampuan dari pada setiap aparat dalam arti sumber daya manusia yang menjadi pelaku dalam pelaksanaan pembangunan. Didalam melaksanakan fungsi dan tugasnya camat juga tidak terlepas dari peran dan partisipasi masyarakat didalam pembangunan menuju tingkat keberhasilan untuk mencapai pembangunan bangsa dan negara.ada pun hasil wawancara tentang keberhasilan pembangunan dikecamatan walenrang utara terhadap informan adalah sebagai berikut:

Deskriptif yang diberikan informan terhadap rumusan masalah peneliti di lokasi penelitian ada pun tanggapan informan tentang koordinasi pemerintah dalam menunjang keberhasilan pembangunan di kecamatan walenrang utara.

2. Tanggapan Informan

Antara koordinasi dan keberhasilan pembangunan mempunyai hubungan yang erat, dimana dengan adanya koordinasi dapat menunjang keberhasilan pembangunan. Hal diatas ditinjau oleh beberapa informan yang diwawancarai oleh penulis salah satunya Pak Camat Walenrang Utara mengatakan hubungan Koordinasi dengan keberhasilan pembangunan sangatlah erat karena tanpa adanya koordinasi dengan pihak – pihak tertentu terutama atasan dan bawahan maupun pemerintah dan masyarakat pembangunan itu tidak akan berjalan dengan baik, sebaliknya meskipun ada beberapa kendala namun apabila komunikasi

dan koordinasi dengan baik, maka setiap permasalahan dapat diselesaikan dan pembangunan dapat berhasil.

Hal ini senada dikatakan oleh kepala desa Buntu Awo, beliau mengatakan koordinasi sangatlah berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan di kecamatan Walenrang Utara koordinasi camat dengan para pegawai kecamatan serta Kepala Kelurahan/Desa sangat menentukan keberhasilan beberapa pembangunan seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Mengenai Koordinasi Pemerintah Daerah Kecamatan Walenrang Utara terhadap Koordinasi yang dilakukan kepada Pemerintah Kelurahan /Desa dan Masyarakat adapun hambatan dalam koordinasi pelaksanaan pembangunan dikecamatan walenrang utara adalah; kurangnya kesamaan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan kepada kelurahan dan desa.

Penulis juga mewawancarai kepala kelurahan Bosso beliau mengatakan dalam setiap rapat koordinasi di Kecamatan Pak Camat selalu membagi tugas setiap kepala – kepala desa dalam pembangunan fisik yang sedang berjalan. Untuk menghasilkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan namun menjadi hambatan dalam koordinasi yang biasa terjadi dalam koordinasi pemerintah adalah kurang disiplinnya aparat pemerintah yang tidak tepat waktu.

Menurut tanggapan informan kepala desa bosso timur tentang koordinasi camat dan kelurahan/desa sudah berjalan dengan maksimal

dalam hal meningkatkan pembangunan yang ada dikecamatan walenrang utara namun menjadi hambatan dalam koordinasi pemerintah kecamatan dan kelurahan dan desa banyaknya pemerintah desa yang tidak hadir dalam rapat koordinasi yang dilakukan karna banyaknya aktifitas masing-masing kelurahan dan desa tersebut.

Dan menurut tanggapan informan kepala desa limbong beliau mengatakan rapat koordinasi yang dilakukan pemerintah kecamatan belum mencapai target yang maksimal dalam melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kelurahan dan desa dikarenakan banyaknya pemerintah kelurahan dan desa belum tau tentang arti pentingnya koordinasi yang dilakukan pemerintah kecamatan namun menjadi hambatan pemerintah kecamatan dalam melaksanakan koordinasi adalah kurangnya pendekatan kepada pemerintah kelurahan/ desa sehingga rapat koordinasi yang dilakukan dikantor camat walenrang utara banyak yang tidak tepat waktu dan banyak yang tidak hadir dalam rapat koordinasi tersebut dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam rapat koordinasi.

dan menurut tanggapan responden terhadap koordinasi Camat Walenrang Utara dengan pemerintah daerah Kelurahan/Desa Dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Responden Tentang Koordinasi Camat Walenrang Utara terhadap
Kepala Kelurahan/Desa

NO	Kategori penilaian	Frtekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	7	23,33%
2	Baik	10	33,33%
3	Cukup Baik	9	30,00%
4	Kurang Baik	3	10,00%
5	Sangat Tidak Baik	1	3,33%
	Jumlah	30	100,00

Sumber: Hasil olahan Data Penelitian, 2014

Berdasarkan Tabel diatas maka Peran Camat selaku pelaksana tugas – tugas Pemerintahan Daerah dan selaku perpanjangan tangan pelaksanaan koordinasi di Kecamatan Walenrang Utara Terhadap Pemerintah Kelurahan/Desa ternyata dari 30 Responden yang mengatakan “sangat baik” 7 orang responden atau 23,33% yang menjawab “Baik” sesuai tanggapan responden 10 orang atau 33,33% menyatakan bahwa Koordinasi Camat Walenrang Utara “Cukup Baik” sebanyak 9 responden atau 30,00% responden sedangkan yang mengatakan “kurang baik” 3 orang atau 10,00% responden menyatakan koordinasi Camat “sangat tidak baik” 1 orang atau 3,33% responden.

Salah satu usaha yang masuk dalam penyelenggaraan program yang dilakukan oleh camat adalah menyangkut program pembangunan yaitu pembanguana fisik dan pembangunan non fisik karna camat mempunyai peran penting sebagai administrator dibidang pembangunan antara lain pengarah usaha dan untuk mensukseskan pembangunan guna membantu kelancaran dan keberhasilan proyek-proyek pemerintah yang dilaksanakan diWilayah Kecamatan, pengawasan dan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta penggalian sumber-sumber pendapatan daerah secara resmi dan sah untuk menunjang pembangunan didaerah.

3. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditunjuk untuk meningkatkan harkat, martabat dan memprekuat jati diri serta keperibadian masyrakat dalam pendekatan loka, nasional dan global dalam prespektif pembangunan. Pemerintah daerah harus memperhatikan kesinambungan berbagai aspek dalam kesatuan wilayah pembangunan terhusus pembangunan disegala bidang. Pemerintah dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan diikuti oleh penyelenggara pemerintah yang akuntabel.pemerintah yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam menwujutkan dalam usaha visi misi pembangunan daerah dan aspirasi cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu,

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggara pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pelaksanaan pembangunan merupakan suatu tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal keberhasilan atau kegagalan pembangunan berkesinambungan dari berbagai aspek pembangunan..

ada pun pembangunan yang dilakukan pemerintah Kecamatan Walenrang Utara sesuai dengan hasil responden dapat dilihat pada tabel

Selanjutnya pada tabel 4.2 akan di tunjukan bagaimana tanggapan responden terhadap perencanaan pembangunan yang ada di Kecamatan Walenrang.

Tabel 4.2

Tanggapan Responden Tentang koordinasi camat dan aparat kelurahan /desa dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Walenrang

NO	Kategori Penilaian	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	3	10,00%
2	Baik	15	50,00%
3	Cukup Baik	5	16,66%
4	Kurang Baik	7	23,33%
5	Sangat Tidak Baik	0	0%
Jumlah		30	100,00

Sumber: Hasil Olahan Data kuesioner penelitian, 2014

Berdasarkan tabel diatas atas perencanaan pembangunan yang ada di Kecamatan Walenrang utara menunjukkan bahwa dari 30 responden yang mengatakan "Sangat Baik", 3 Orang atau sama dengan 10% responden yang menjawab "baik" 15 responden atau 50,00% yang menyatakan "cukup baik" 5 orang atau 16,66% responden kemudian yang menjawab "kurang baik" 7 orang atau 23,33% responden sedangkan yang menjawab "sangat tidak baik" 0 orang atau sama 0% responden, atau tidak ada sama sekali.

Berdasarkan tabel diatas berarti bahwa kinerja perencanaan pembangunan di kecamatan walenrang utara masih bisa dikatakan baik dalam perencanaan pembangunan. hal ini perlu peningkatan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di kecamatan walenrang utara.

4. Koordinasi pemerintah dengan masyarakat dalam keberhasilan pembangunan.

Keberhasilan pembangunan diberbagai negara bahwa ada salah satu syarat yang perlu untuk menunjukan tingginya tingkat keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu dimulai dari mantapnya pemahaman dari para aparat daerah terkait tentang maksud indikator-indikator dan variabel-variabel pembangunan serta pengertian kebijaksanaan yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah, dimana kedua kebijakan tersebut harus saling melengkapi atau searah. Pemahaman yang memadai tentang indikator pembangunan daerah akan mengakibatkan semakin terarahnya pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan dan semakin

tingginya responsi masyarakat dalam menyukseskan dan mencapai sasaran yang ditargetkan hal ini perlu diperhatikan dari pihak kecamatan Wealenrang Utara atau pengambil keputusan, mengingat proses panjang perjalanan bangsa ini untuk mengisi kemerdekaan harus mendapatkan perhatian dari kita semua. Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan atas struktur sosial. Pada umumnya pembangunan di segala bidang banyak negara-negara yang sedang berkembang untuk melakukan pembangunan oleh karna paradigma tradisional mengenai pembangunan cenderung mengindentikkan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karna itu setiap analisis realistik terhadap masalah-masalah pembangunan perlu ditopang dengan variabel-variabel baik itu variabel ekonomi maupun non ekonomi sebagai indikator atau tolak ukur keberhasilan ada pun tanggapan responden tentang keberhasilan pembangunan di Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten luwu dapat dilihat pada tabel berikut:

Selanjutnya akan di tunjukan pada tabel 4.4 bagaimana tanggapan responden terhadap kebehasilan pembangunan yang ada di Kecamatan Walenrang Utara.

Tabel 4.3

**Tanggapan Responden Tentang koordinasi pemerintah kecamatan
dengan masyarakat dalam Keberhasilan Pembangunan Di Kecamatan
Walenrang Utara**

NO	Kategori Penilaian	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	2	6,66%
2	Baik	9	30,00%
3	Cukup Baik	10	33,33%
4	Kurang Baik	9	30,00%
5	Sangat Tidak Baik	0	0%
	Jumlah	30	100,00

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2014

Berdasarkan tabel di atas tanggapan responden tentang keberhasilan pembangunan. Dari 30 responden yang mengatakan "Sangat Baik", 2 orang responden atau 6,66 responden yang mengatakan "Baik, 9 Orang atau sama dengan 30,00% responden dan Cukup Baik" 10 orang responden 33,33% responden sedangkan yang mengatakan "kurang baik" 9 Orang responden atau 30,00% responden terus yang mengatakan "sangat tidak baik" tidak ada sama sekali yang menjawab atau 0% responden

. Bila kita melihat tabel diatas tentang keberhasilan pembangunan dikecamatan walenrang utara sesuai dari hasil responden sudah diatas cukup

baik. Hal ini berarti pemerintah harus mempunyai peningkatan dalam menjalankan keberhasilan pembangunan di kecamatan walenrang utara.

5. partisipasi masyarakat dalam mendukung pemerintah kecamatan dalam meningkatkan pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan arah dalam pengambilan keputusan dan memberi kontribusi besar dalam pelaksanaan pembangunan menyertakan masyarakat dalam proses pembangunan juga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sebagai perwujudan proses politik yang demokratis. Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam pengembangan masyarakat atau pembangunan diberbagai bidang.

Menurut informan yang selaku Sekcam walenrang utara menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan pembangunan di Kecamatan walenrang utara sangat kurang. Ketidak tahuan masyarakat dengan alasan utama karna juga faktor situasi dan kondisi.

a) Faktor –faktor pendorong partisipasi masyarakat

Partisipasi akan efektif dan berjalan dengan baik jika tujuan partisipasi tercapai berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa ada lima kondisi yang mendorong partisipasi masyarakat.

- Isu kegiatan dianggap penting bagi masyarakat
- Kegiatan yang dilakukan membawa perubahan

- Pendidikan dan keterampilan
- Pengakuan atas beberapa bentuk partisipasi
- Masyarakat yang berpartisipasi didukung oleh suatu situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk berpartisipasi

b) Faktor yang menghambat partisipasi masyarakat

- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
- Pengaruh budaya asing yang mempengaruhi adat istiadat masyarakat di kecamatan walenrang utara
- Tingkat penghasilan penduduk yang rendah

Dalam proses pembangunan di wilayah Kecamatan Walenrang Utara, fungsi aparat pemerintah merupakan pelaksanaan pembangunan. Peran serta masyarakat pada umumnya tidak akan lepas dalam kaitan ini, karna tanggung jawab pembangunan tidak hanya semata – mata berada ditangan pemerintah saja akan tetapi menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Adapun tanggapan dari responden terhadap kalangan masyarakat atas keikutserataanya dalam melakukan partisipasi dalam hal pembangunan infrastruktur didaerah kecamatan walenrang utara dan dapat menghasilkan kerja sama yang baik, pentingnya kerja sama dapat dirasakan terutama dalam memecahkan masalah di wilayah Kecamatan Walenrang Utara Seorang informan Walenrang Utara Bapak Sekcam mengatakan bahwa pembangunan yang sudah direncanakan berjalan dengan lancar, terlihat dengan beberapa pembangunan

sudah terlihat meskipun belum berjalan 100% setidaknya sudah ada pembangunan yang terlihat.

Dalam sistem demokrasi pemerintahan yang demokratis konsep partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep yang penting karena berkaitan langsung dengan demokratis sebagai sistem pemerintahan yang fokus pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan, partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk mulai dari berupa keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan yang maupunsifatnya tidak langsung, seperti sumbangan dana tengah, pikiran, maupun pendapat dalam kebijakan pemerintah. adapun pembangunan di Kecamatan Walenrang Utara dapat dilihat pada Tabel berikut:

Selanjutnya kita melihat tabel 4.4 yang mengenai tentang dukungan masyarakat terhadap pembangunan yang ada di Kecamatan Walenrang Utara

Tabel 4.4

Tanggapan Responden dukungan masyarakat dalam Meningkatkan pembangunan di Kecamatan Walenrang Utara

NO	Kategori penilaian	Frekuensi	Presentase
1	Sangat baik	8	26,66%
2	Baik	9	30,00%
3	Cukup baik	7	23,33%
4	Kurang baik	5	16,66%
5	Sangat Tidak baik	1	3,33
Jumlah		30	100,00

Sumber: Hasil olahan data penelitian, 2014

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil penelitian dari 30 responden yang menjawab “sangat baik” 8 orang atau 26,66% responden sedangkan yang menjawab “baik” 9 orang atau 30,00% responden kemudian yang menjawab “cukup baik” 7 orang responden atau sama dengan 23,33% responden dan menjawab “kurang baik” 5 orang responden atau sama dengan 16,66% responden selanjutnya yang menjawab “sangat tidak baik” 1 orang responden atau 3,33% responden.

dari hasil tabel diatas terhadap tanggapan responden tentang partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan di kecamatan walenrang utara sangat baik, hal ini perlu peningkatan yang baik dari pemerintah kecamatan dalam hal pendekatan kepada masyarakat untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan.

6. Kelancaran pembangunan

Pembangunan di daerah kecamatan Walenrang utara sudah memberikan kemajuan yang berarti tetapi hal yang terpenting dalam pembangunan daerah adalah pembangunan infrastruktur, perlu diketahui bahwa untuk memajukan sebuah daerah adalah sebuah keniscayaan, ada hal terpenting yang harus diperhatikan yaitu pemerintah harus memperhatikan kondisi infrastruktur didaerahnya infrastruktur akan menunjang kelancaran pembangunan dan memacuh perkembangan kesejahteraan masyarakat tersebut karena infrastruktur adalah modal awal untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik dan menciptakan kesejahteraan masyarakat daerah. Maka sesuai dari

hasil penelitian peneliti dilokasi melihat pembagunan didaerah Kecamatan Walenrang Utara masih belum efektif akan tetapi sesuai dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu kepala desa buntu awa mengatakan bahwa kelancaran pembanguna di kecamatan walenrang utara sudah efektif maka sesuai dengan hasil tanggapan responden dilokasi penilitia kecamatan walenrang Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Selanjutnya kita melihat tabel 4.5 mengenai kelancaran pembangunan yang ada di Kecamatan walenrang Utara.

Tabel 4.5
Tanggapan Responden Terhadap Kelancaran Pembangunan Di Kecamatan Walenrang Utara

NO	Kategori Penilaian	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	7	23,33%
2	Baik	8	26,66%
3	Cukup baik	8	26,66%
4	Kurang baik	5	16,66%
5	Sangat Tidak baik	2	6,66%
Jumlah		30	100,00%

Sumber: Hasil Olahan data penelitian, 2014

Dari hasil olahan data menunjukkan bahwa 30 reponden yang mengatakan "Sangat baik" 7 orang responden atau sama dengan 23,33% responden yang menanggapi "baik" 8 orang responden atau 26,66%,

sedangkan yang mengatakan “cukup baik” 8 orang responden atau sama dengan 26,66% responden terus yang mengatakan “kurang baik” 5 orang atau 16,66% responden sedangkan yang mengatakan “sangat tidak baik” 2 orang responden atau 6,66%

Dari hasil tabel diatas tentang kelancaran pembangunan di kecamatan walenrang utara itu masih cukup baik sesuai dari hasil responden. Hal ini perlu peningkatan dari pemerintah untuk kelancaran pembangunan di kecamatan walenrang utara.

B. Faktor Penghambat penerapan koordinasi aparat Pemerintah kecamatan Walenrang Utara

1. Tingkat partisipasi pemerintah kecamatan dan kelurahan/desa dalam proses peningkatan pembangunan.

Sesuai penelitian peneliti dilapangan tentang tingkat partisipasi pemerintah dalam proses peningkatan pembangunan didaerah kecamatan walenrang utara memiliki peran yang sangat penting didalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan. Khususnya pada pemerintah tingkat luran dan desa untuk mengubah kultur dan akses terhadap ilmu pengetahuan teknologi baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintah daerah, dan pemerintah walenrang utara harus mampu membuka gagasan baru untuk meningkatkan pembangunan di kecamatan walenran utara adapapun tanggapan responden tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam

peningkatan pembangunan di kecamatan walenrang utara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6

Tanggapan Responden tentang Partisipasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/desa Dalam Proses Peningkatan Pembangunan

NO	Kategori Penilaian	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	8	26,66%
2	Baik	9	30,00%
3	Cukup baik	9	30,00%
4	Kurang baik	4	13,33%
5	Sangat Tidak baik	0	0%
Jumlah		30	100,00

Hasil olahan kusioner data 2014

Berdasarkan tabel diatas tentang tanggapan responden terhadap partisipasi pemerintah kecamatan dan kelurahan / desa dalam proses peningkatan pembangunan adapun tanggapan 30 responden yang mengatakan "sangat baik" 8 orang responden atau 26,66% responden sedangkan yang mengatakan "baik" 9 orang responden atau 30,00% responden dan yang mengatakan "cukup baik" 9 orang responden atau 30,00% responden terus yang mengatakan "kurang baik" 4 orang responden atau 13,33% dan yang mengatakan "sangat tidak baik" 0 orang responden atau 0% responden atau tidak ada sama sekali.

Hal diatas menunjukkan tentang partisipasi pemerintah dalam proses pembangunan sudah bisa dikatakan baik, namun pemerintah kecamatan harus lebih meningkatkan partisipasi dalam hal pembangunan untuk pembangunan yang berkesinambungan.

2 Komonikasi Pemerintah ke masyarakat dalam menunjang keberhasilan pembangunan Komonikasi

Komonikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karna komonikasi sejumlah unit dalam organisasi akandapat berkoordinasi berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh komonikasi. Komonikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupanya,

Dari pengertian komonikasi sebagaimana disebut diatas terlihat bahwa komonikasi itu mengandung arti komonikasi yang bertujuan merubah tingkah laku manusia karna sesuai dengan pengertian ilmu komonikasi suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas azas-asas tersebut disampaikan komonikasi tersebut merupakan suatu hal perubahan sikap dan pendapat akibat informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Ada pun komonikasi pemerintah kecamatan dalam menunjang peroses pembangunan di kecamatan walenrang utara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut tentang komonikasi pemerintah dalam menunjang proses pembangunan.

Tabel 4.7

**Tanggapan Responden tentang komunikasi pemerintah dalam
menunjang proses Pembangunan di kecamatan Walenrang Utara**

NO	Kategori Penilaian	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	0	0%
2	Baik	6	20,00%
3	Cukup baik	10	33,33%
4	Kurang baik	12	40,00%
5	Sangat Tidak baik	2	6,66%
Jumlah		30	100,00

Hasil olahan kusioner data 2014

Berdasarkan tabel diatas tentang komunikasi pemerintah dalam proses pembangunan di kecamatan walenrang utara dari 30 responden yang menjawab “sangat baik” 0 orang atau 0% responden yang menjawab “baik” 6 orang atau 20,00% responden yang menjawab “cukup baik” 10 orang atau 33,00% responden kemudian yang menjawab “kurang baik” 12 orang atau 40,00% responden sedangkan yang menjawab “ sangat tidak baik” 2 orang tidak ada sama sekali atau 5,66% responden.

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa komunikasi pemerintah dalam proses peningkatan pembangun dikecamatan walenrang utara kurang baik hal ini perlu peningkatan dalam hal komunikasi dengan masyarakat

kecamatan walenrang utara dalam proses peningkatan pembanguna yang ada di kecamatan walenrang utara.

3. kesamaan tindakan pemerintah dengan masyarakat dalam mensukseskan pembangunan.

Pada hakikatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau suatu organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi kesatuan dari pada usaha bahwa pimpinan harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian didalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu yang dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Sesuai hasil responden tentang kesamaan tindakan pemerintah dengan masyarak dalam mensukseskan pembanguna di kecamatan walenrang utara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Selanjutnya tabel kesamaan tidakan dalam mensukseskan proses pembangunan di kecamatan walenrang utara.

Tabel 4.8

Tanggapan Responden Terhadap Kesamaan Tindakan pemerintah dan Masyarakat dalam proses Pembangunan Yang Ada Di Kecamatan Walenrang Utara

NO	Kategori Penilaian	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	0	0%
2	Baik	16	53,33%
3	Cukup Baik	6	20,00%
4	Kurang Baik	8	26,66%
5	Sangat Tidak Baik	0	0%
Jumlah		30	100,00

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2014

Berdasarkan tabel diatas tentang kesamaan tindakan pemerintah kecamatan dengan masyarakat dalam proses pembangunan dikecamatan walenrang utara ada pun tanggapan 30 responden adalah yang mengatakan "sangat baik" 0 orang atau sama dengan 0% responden sedangkan yang mengatakan "baik" 16 orang atau 53,33% sedangkan yang mengatakan "cukup baik" 6 orang atau 20,00% selanjutnya yang mengatakan "kurang baik" 8 orang atau 26,66% responden sedangkan yang mengatakan "sangat tidak baik" 0 orang atau tidak sama sekali 0% responden

Berdasarkan tabel diatas tentang kesamaan tindakan pemerintah dengan masyarakat dalam proses pembanguana dikecamatan walenrang utara

sudah terbilang baik, hal ini perlu peningkatan kesamaan tindakan dalam proses pembangunan.

4. pembiayaan yang dilakukan pemerintah dalam proses pembangunan

Sejalan dengan pelaksanaan pembanguna di daerah dan pelaksanaan otonomi daerah maka dalam tahun anggaran 2001 pemerintah kembali melakukan penyempurnaan dan penampilan APBN, apabila wktu-waktu yang lalu anggaran nyang ditrasfer kedaerah dalam anggaran rutin daerah, dan anggaran pembangunan yang dikelolah daerah maka sejak RAPBN 2012 dirubah menjadi dana perimbangan, perubahan ini menunjukkan otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan suatu hal yang menarik dalam seluruh format penampilan APBN diatas adalah dikelompokan pengeluaran pemerintah kedalam pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, adapun tanggapan responden terhadap pembiayaan atau pengeluaran terhadap pembangunan yang ada dikecamatan walenran utara dapat dilihat pada tabel berikut ini

Selanjutnya tabel 4.9 tentang pembiayaan pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam proses pembangunan.

Tabel 4.9

Tanggapan Responden Tentang Pembiayaan yang dilakukan Pemerintah Kecamatan dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Walenrang Utara

NO	Kategori Penilaian	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	1	3,33%
2	Baik	8	26,66%
3	Cukup Baik	10	33,33%
4	Kurang Baik	9	30,00%
5	Sangat Tidak Baik	2	6,66%
Jumlah		30	100,00

Hasil Olahan Data penelitian 2014

Berdasarkan tabel diatas tentang pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan walenrang utara menurut 30 responden yang mengatakan “sangat baik” 1 orang responden atau 3,33% dan yang mengatakan “baik” 8 orang responden atau 26,66% terus yang mengatakan “cukup baik” 10 orang responden atau 33,33% dan yang mengatkan “kurang baik” 9 orang responden atau 30,00% responden selanjutnya yang mengatakan “sangat tidak baik” 2 orang responden atau 6,66%.

Hal diatas menunjukan tentang pembiayaan pembangunan di kecamatan walenrang utara cukup baik hal ini menjadi pelajaran buat

pemerintah daerah untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan untuk memperlancar pembangunan yang efektif.

5. pemerintah kecamatan dalam peningkatan mutu pembangunan

upaya pemerintah kecamatan dalam meningkatkan mutu pembangunan merupakan prioritas dalam pembangunan nasional disamping prioritas lainya ada pun dua hal yang paling penting dalam mutu pembangunan meningkatkan mutu pembangunan merupakan rancangan induk yang besar dan jangka panjang sesuai konsepsi yang jelas yang sesuai dari semua jajaran, dan selanjutnya dalam pelaksanaan mutu pembangunan seharanya diperhatikan situasi empiris dan kendala-kendala yang diperkirakan timbul sehingga bersifat inovatif dan tidak mengulagi usaha yang tidak berhasil dalam pembangunan adapun tanggapan responden tentang mutu pembanguna di kecamatan walenrang utara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Selanjutnya pada tabel berikut ini tentang pemerintah kecamatan dalam meningkatkan mutu pembangunan dikecamatan walenrang utara.

Tabel 4.10
Tanggapan responden tentang pemerintah kecamatan dalam
meningkatkan mutu pembangunan

NO	Kategori Penilaian	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	1	3,33%
2	Baik	10	33,33%
3	Cukup Baik	10	33,33%
4	Kurang Baik	8	26,66%
5	Sangat Tidak Baik	1	3,33%
Jumlah		30	100,00

Hasil Olahan data penelitian 2014

Berdasarkan tabel diatas tentang pemerintah kecamatan dalam meningkatkan mutu pembanguana menurut tanggapan dari 30 responden yang mengatakan “sangat baik” 1 orang responden atau 3,33% responden dan yang mengatakan “baik” 10 orang responden 33,33% terus yang mengatakan “cukup baik” 10 orang responden atau 33,33% responde dan yang mengatakan “ kurang baik” 8 orang responden atau 26,66% reponden selanjutnya yang mengatakan “ sangat tidak baik” 1 orang atau 3,33% responden

Hal diatas menunjukan tentang pemerintah dalam meningkatkan mutu pembagunan sudah baik, hal ini menjadi tugas pemerintah kecamatan dalam meningkatkan mutu pembanguana di kecamatan walenrang utara.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Partisipasi masyarakat dalam lingkup pembangunan itu merupakan keterlibatan nyata orang-orang dalam perencanaan pembangunan keterlibatan dalam melaksanakan program dan keputusan serta keterlibatan mereka dan menikmati hasil dan partisipasi dalam melaksanakan evaluasi pembangunan
2. Camat dalam melaksanakan koordinasi pembangunan dikecamatan walenrang utara dalam hal ini monitoring terhadap pembangunan jika tidak ditunjang dengan dukungan motivasi kerja, serta laporan pelaksanaan pembangunan akan mempengaruhi pelaksanaan koordinasi pengawas secara keseluruhan koordinasi yang dilaksanakan oleh camat walenrang utara dapat dilaksanakan dengan efektif karna dukungan partisipasi masyarakat adanya informasi yang diterima dari instansi yang terkait berdasarkan peraturan yang ada.
3. Keberhasilan dari pada camat didalam melaksanakan tugasnya dalam menunjang keberhasilan pembangunan diwilayahnya tergantung juga dari bagaimana teknik, cara dan seni dari pada seorang camat selaku pimpinan wilayah.

4. Koordinasi camat dalam menunjang keberhasilan pembangunan di wilayah kecamatan walenrang utara kabupaten luwu sudah dilaksanakan secara maksimal evaluasi kinerja camat telah dilaksanakan dengan baik sesuai program.
5. Koordinasi camat dalam menunjang keberhasilan pembangunan di kecamatan walenrang utara harus selalu melakukan pendekatan yang efektif kepada masyarakat yang ada di kecamatan walenrang utara

B. SARAN

1. Disarankan kepada camat walenrang utara dan stafnya dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai administrator pemerintahan, administrator pembangunan dan administrator kemasyarakatan di wilayah kecamatan walenrang utara untuk dapat memperhatikan gaya atau seni memimpin masyarakat serta menggunakan pendekatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat agar tujuan utama yaitu pembangunan di kecamatan walenrang utara dapat berjalan dengan baik
2. Hendaknya masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk berpartisipasi membantu pemerintah kecamatan dalam pembangunan, sebab partisipasi masyarakat itu sendiri dalam rangka usaha mereka untuk memperbaiki taraf hidup mereka sedapat-dapatnya berdasarkan kekuatan dan prakarsa sendiri serta ditunjang dengan bantuan dan

pelayanan teknis pemerintah dalam berbagai program yang direncanakan untuk melancarkan perbaikan terhadap kepentingan umum masyarakat

3. Pemerintah dan masyarakat harus selalu searah baik secara tindakan untuk mensukseskan arah pembanguna yag baik dan pembangunan yang berkelanjutan di kecamatan walenrang utara



DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirjo, Prajudi, 1979, *Administrasi dan Manajemen Umum*, PT Gahlia Indonesia, Jakarta
- A.W.Widjaja, 1985, " *Peranan Motivasi dalam kepemimpinan*", Akademika presiden. Jakarta
- A.M.mangunhardjana,SJ,1976 " *Kepemimpinan* " Yayasan Kanasius. Yogyakarta
- Alfred R.Latiener,1985." *Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja* ". Aksara Baru. Jakarta
- Efendi Taufik, 1995, *Dasar-Dasar keterampilan Abdi Negara Melayani Masyarakat*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Farid Ali,2001 *Teori dan konsep Administrasi, dari pemikiran paradigmatic menuju redefensi*, Raja grafindo Persada Jakarta
- Gaspersz Vincent (Eds,,), Indonesia " *Manajemen Kualitas; Penerapan Konsep Kualitas Dalam Manajemen Bisnis Total* ", Gramedia Indonesia
- G.R.Terry dan Rule,L.W.2003 " *Dasar-dasar manajemen* "Terjemahan Ticoula G.A. Bumi Aksara. Jakarta
- Ibrahim, Soewarno, 1997, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, PT Gunung Agung, Jakarta
- J.Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT. Rineka
- J.Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT. Rineka
- Kotler, 1995, *How To Improve Your Customer Service*" (Eds,,) Indonesia 1997 " *Kiat Meningkatkan Pelayanan Bagi Pelanggan*" Gramedia Indonesia
- Lailil Kadar, 1994, *Organisasi dan Manajemen*, Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta
- Masihanto, 1999, *Organisasi dan Motivasi*, Bumi Aksara, Jakarta

Soewarno Handyaningrat, *Adminisitrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta : PT Gunung Agung, 2002), hlm. 117

Sondang P. siagian, 1983. “ *Organisasi, kepemimpinan dan Perilaku administrasi* “. PT.Gunung Agung, Jakarta

The Liang Gie. 1992 “ *Administrasi perkantoran Moderen*” Yogyakarta, Libreti

Thoha, Mifta. 2003a.*Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. (cetakan kedelapan).Jakarta : Raja Grafindo Persada

Tjokroamidjojo, Bintor Prof,MA “*Perencanaan Pembangunan*” PT. Gunung Agung, Jakarta

Sugiyono, 1997. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfa Beta

Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi Metode R & D*. Bandung Alfa Beta

Sujatmiko,Ir.1987, “*Aspek-aspek pengawasan di Indonesia*” Sinar Grafika, Jakarta.

....., 2001, *Kewenangan pemerintah Desa*, Departemen Dalam Negeri Jakarta.

....., 2002, *Orientasi penguatan otonomi Desa*, Pemprov Sul-Sel

....., 2002 “ *Himpunan peraturan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.

....., *Undang-undang No. 32 Tahun 2004, “tentang Pemerintahan Daerah”*, citra umbara, bandung

Khairuddin H, Drs , 1992, “ *Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan*” Liberty, Yokyakarta

Anwar, 2005, *Hubungan dengan konsep Pembangunan Daerah*” Prestasi Pustaka karya, Jakarta

LAMPIRAN 1

TANGGAPAN 30 RESPONDEN TERHADAP KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH CAMAT DALAM
MENUNJANG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN WALENRANG UTARA

No Responden	Jawaban Responden Terhadap Koordinasi Pemerintah Daerah (camat) Dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan Di Kecamatan Walenrang Utara					Jumlah
	1	2	3	4	5	
1	3	3	3	4	3	16
2	2	3	2	4	1	12
3	4	4	3	5	2	16
4	1	2	3	5	5	18
5	3	4	4	2	2	16
6	3	2	3	4	4	15
7	5	4	2	5	2	16
8	3	4	5	2	5	18
9	3	4	2	4	3	19
10	4	5	2	1	4	16
11	4	5	2	2	4	17
12	3	2	3	2	4	14
13	4	2	4	5	4	19
14	5	2	4	4	4	19
15	5	4	4	3	5	21
16	3	4	4	3	4	18
17	4	3	4	4	5	20
18	3	2	4	3	3	15
19	4	3	2	5	3	17
20	3	2	3	4	5	17
21	2	4	3	2	5	16
22	2	4	2	5	3	16
23	4	4	3	4	2	17
24	5	3	2	3	4	17
25	5	5	5	5	3	23
26	4	4	3	3	3	17
27	4	4	4	3	5	20
28	5	4	4	4	3	20
29	5	4	3	3	2	17
30	4	4	2	5	1	16
Jumlah	109	104	94	108	103	518

Sumber Data: Hasil Olahan kuisioner tahun 2014

LAMPIRAN II

TANGGAPAN 30 RESPONDEN TENTANG PENGHAMBAT PENERAPAN KOORDINASI APARAT
PEMERINTAH DAERAH

No Responden	Tanggapan Responden Tentang Penghambat koordinasi Pemerintah Daerah Camat					Jumlah
	1	2	3	4	5	
1	5	4	2	2	2	15
2	2	2	3	2	2	11
3	4	3	4	3	2	16
4	5	2	4	3	2	16
5	4	3	2	3	2	14
6	3	2	3	3	2	14
7	3	2	3	3	2	15
8	4	3	2	5	2	16
9	3	2	2	3	1	11
10	5	2	4	3	5	19
11	3	3	4	1	4	16
12	2	3	2	1	4	12
13	5	1	4	2	4	16
14	4	2	4	2	4	16
15	5	2	3	2	4	16
16	4	3	4	3	4	18
17	2	4	4	4	4	18
18	4	2	4	4	4	18
19	5	3	2	4	4	18
20	3	2	3	4	4	16
21	3	1	4	2	3	13
22	2	4	3	2	3	14
23	3	2	2	2	3	12
24	5	4	3	2	3	14
25	5	4	4	3	3	19
26	4	3	4	3	3	17
27	3	3	3	3	3	17
28	4	4	4	4	3	19
29	4	3	4	4	3	18
30	3	2	4	4	3	16
Jumlah	111	80	99	87	92	470

Sumber Data: Hasil Olahan kuisioner 2014

**PERTANYAAN MENGENAI KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENUNJANG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DIWILAYAH KECAMATAN
WALENRANG UTARA**

NAMA :
ALAMAT :
PENDIDIKAN :
UMUR :
STATUS :
NO TELEPON :

A. Koordinasi pemerintah daerah (camat) dalam menunjang keberhasilan pembangunan diwilayah kecamatan walenrang utara

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai koordinasi camat walenrang utara terhadap kepala kelurahan / desa ?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e. Sangat tidak baik
2. Bagaimana koordinasi camat dengan aparat kelurahan/desa dalam perencanaan pembangunan dikecamatan walenrang utara?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e. Sangat tidak baik
3. Bagaimana penilaian antara anda mengenai koordinasi pemerintah kecamatan dengan masyarakat kecamatan walenrang utara dalam keberhasilan pembangunan?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e. Sangat tidak baik

4. Bagaimana motivasi masyarakat dalam mendukung pemerintah dalam meningkatkan pembangunan

- a. Sangat baik
- b. Baik
- c. Kurang baik
- d. Tidak baik
- e. Sangat tidak baik

5. Menurut tanggapan anda bagaimana kelancaran pembangunan di kecamatan walenrang utara

- a. Sangat baik
- b. Baik
- c. Cukup baik
- d. Kurang Baik
- e. Sangat tidak Baik

B. Faktor penghambat penerapan koordinasi aparat pemerintah kecamatan walenrang utara

1. Bagaimana tingkat partisipasi pemerintah kecamatan dan kelurahan/desa dalam proses peningkatan pembangunan

- a. Sangat baik
- b. Baik
- c. Cukup baik
- d. Kurang baik
- e. Sangat tidak baik

2. Menurut anda bagaimanaka komunikasi pemerintah ke masyarakat dalam menunjang proses pembangunan kecamatan walenrang utara

- a. Sangat baik
- b. Baik
- c. Cukup baik
- d. Kurang baik
- e. Sangat tidak baik

3. Menurut anda bagaimana kesamaan tindakan pemerintah dan masyarakat dalam mensukseskan pembangunan dekecamatan walenrang utara

- a. Sangat baik
- b. Baik
- c. Cukup baik
- d. Kurang baik
- e. Sangat baik

4. Bagaimana tanggapan anda mengenai pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses pembangunan di kecamatan walenrang utara.
- a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
 - e. Sangat tidak baik
5. Bagaimana tanggapan saudara kepada pemerintah kecamatan dalam penyamaan persepsi dalam menentukan kebijakan pembangunan dikecamatan walenrang utara
- a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
 - e. Sangat tidak baik

